

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PENYIDIK
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program
Studi Strata I pada Jurusan Hukum Pada Fakultas Hukum**

Oleh :

YULIANA SULISTYANINGRUM

C 100 130 015

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PENYIDIK
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

YULIANA SULISTYANINGRUM

NIM. C.100.130.015

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Hartanto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PENYIDIK
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

YULIANA SULISTYANINGRUM

NIM. C.100.130.015

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal: 29 Maret 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Maret 2018

Penulis



YULIANA SULISTYANINGRUM
C.100.130.015

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Abstrak

Dalam mengungkap suatu perkara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sangat memerlukan asas koordinasi, Asas Koordinasi di dalam peraturan perundang-undangan dapat bersifat Koordinatif, pengawasan, pembinaan kemampuan serta pemberian petunjuk. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formil. Fungsi Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri bertujuan untuk menyatukan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkut dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menyangkut pautkan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu unit kerja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai hubungan kerja yang baik dan harmonis dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Kata kunci: Koordinasi, Pengawasan, Penyidik

Abstract

In disclosing a case, the Civil Service Investigator with the Police Investigator of the Republic of Indonesia desperately needs the principle of coordination, Coordination Principles in the legislation can be Coordinative, supervision, capacity building and guidance. Supervision is the process of observation of the implementation of all activities of civil servant investigators in the framework of conducting an investigation that is being conducted can be justified in material and formal. The Coordination Function between Civil Servant Investigators and Police Investigators aims to unify and adapt activities, connect to each other, involve and adapt activities, so that these activities become a work unit, Civil Servant Investigators as part of the criminal justice system has a good and harmonious working relationship with the Police Investigator of the Republic of Indonesia.

Keywords: Coordination, Supervision, Investigator

1. PENDAHULUAN

Di dalam prakteknya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sering terdengar adanya kelemahan-kelemahan pengaturan dalam berbagai hal. KUHP dengan segala kekurangannya hingga saat ini masih dinyatakan berlaku sebelum dinyatakan sebaliknya, apabila oleh pemerintah telah diundangkan Undang-

Undang mengenai hukum acara pidana yang baru. Terlepas dari adanya kekurangan-kekurangan yang ada maupun kelemahan-kelemahan dalam praktek sebenarnya apabila ditelusuri dari asas-asas terbentuknya KUHAP disusun dengan berbagai asas yang cukup memadai untuk berlakunya suatu Undang-Undang. Sebagaimana diketahui bahwa asas-asas hukum adalah merupakan fondamen bagi pembentukan norma hukum. Fondamen yang kuat dari KUHAP yang berisi tentang berbagai asas hukum bagaimanapun juga harus diakui keberadaannya tetap mendukung tegak dan eksisnya KUHAP hingga saat ini.

Berbagai macam asas yang mendukung keberadaan KUHAP antara lain : asas legalitas, asas oportunitas, asas diferensiasi fungsional, asas praduga tidak bersalah, asas persamaan dimuka hukum, asas perlindungan hak asasi manusia serta asas koordinasi, adalah hubungan kerja antara alat negara penegak hukum, yang meliputi: kepolisian, kejaksaan serta pengadilan. Sebagaimana diketahui tugas kepolisian dalam penegakan hukum melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana.

Dalam kehidupan tindak pidana yang terjadi meliputi berbagai bidang kehidupan. Bidang-bidang tertentu yang juga tidak luput dari objek kejahatan dalam penanganannya memerlukan pemahaman dari aparat yang menguasai bidang permasalahannya. Sesuai dengan hal ini, maka didalam KUHAP telah ditetapkan adanya penyidik pegawai negeri sipil, “Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal”.¹ Sebagaimana diketahui penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Asas koordinasi sangat penting dalam pelaksanaan tugas bagi Penyidik Pegawai Negeri dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Maka dengan ini, perlu dilakukan penelitian

¹ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 113.

mengenai keberadaan asas tersebut dalam peraturan perundang-undangan, fungsi pelaksanaan koordinasi serta masalah keharmonisan dengan adanya hubungan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. penulis ingin meneliti dan mengetahui lebih banyak tentang asas koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA”**.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana keberadaan asas koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam peraturan perundang-undangan? *Kedua*, Apa Fungsi pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia? *Ketiga*, Apa dengan terjadinya hubungan Koordinasi dapat memberikan suatu keharmonisan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, Untuk mengetahui keberadaan asas koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Untuk mendapatkan Pengetahuan mengenai Fungsi pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. *Ketiga*, Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai hubungan Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Manfaat penelitian ini adalah *pertama*, Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bimbingan pemikiran dan landasan teoritis pengembangan disiplin dalam bidang hukum acara pidana dan Hukum Pidana dan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah cakrawala dibidang penelitian ilmiah. *Kedua*, Manfaat Praktis, Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah dan ruang lingkup yang diteliti serta dikaji secara seksama.

2. METODE

Metode yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis Normatif. Penulis ingin melakukan pendekatan terhadap asas koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia. jenis penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang penulis lakukan berdasarkan data sekunder sebagai objek kajian. Sifat penelitian “Dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.”² Dalam hal ini penulis memfokuskan atau memberikan gambaran seluas-luasnya tentang keberadaan asas koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia. Jenis data dari penelitian ini yakni data sekunder.³ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui KUHAP, pedoman KUHAP, serta peraturan perundangan lainnya. Metode Pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari buku-buku serta literatur yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode nalisis data secara kualitatif. “Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intrepretasi data”.⁴

Pada Pasal 1 butir 2 tercantum “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁵

² Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari limgkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data yang lain. Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 38-39.

³ I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, hal. 35.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, hal. 172.

⁵ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 16-17.

“Menurut peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No. 27 tahun 1983, diatur mengenai syarat kepangkatan dan pengangkatan “Penyidik”, pada BAB II Pasal 2 yang berbunyi:”⁶ Penyidik adalah (1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan dua Polisi, (2) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu (3) Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik Pembantu adalah (1) Pejabat Polisi Negara yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua Polisi, (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.”⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Macam-macam tindakan penyidikan adalah (1) Penangkapan, (2) Penahanan, (3) Penggeledahan, (4) Penyitaan, (5) Pemeriksaan Surat.

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2012 koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi

⁶ M. Muhtarom, 1997, *Hukum Acara Pidana (Bagian I)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8.

⁷ *Ibid.*, hal. 9.

kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.

Prinsip-prinsip koordinasi adalah kebenaran-kebenaran yang pokok atau apa yang diyakini menjadi kebenaran-kebenaran dalam bidang koordinasi. Menurut George R Terry dan Stephene G. Franklin mengatakan prinsip dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan atau kebenaran yang pokok yang memberikan suatu petunjuk untuk berfikir atau bertindak. Pernyataan yang pokok memberitahukan hasil-hasil apakah yang dikemukakan bila prinsip itu diterapkan.

“Manfaat Koordinasi adalah (1) Menciptakan keseimbangan tugas maupun hak antara setiap bagian dalam organisasi maupun antara setiap anggota dalam bagian-bagian tersebut. (2) Mengingatkan setiap anggota bahwa mereka bekerja untuk tujuan bersama, sehingga tujuan-tujuan individu yang bertentangan dengan tujuan bersama tersebut dapat dihilangkan. (3) Menciptakan efisiensi yang tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang terkoordinasi akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tanpa koordinasi. (4) Menciptakan suasana kerja yang rukun, damai, dan menyenangkan. Para anggota saling menghargai satu sama lain karena mereka sadar bahwa mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama”.⁸

“Tujuan koordinasi adalah (1) Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kearah tercapainya sasaran perusahaan. (2) Untuk menjuruskan keterampilan spesialis kearah sasaran perusahaan. (3) Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan. (4) Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran. (5) Untuk mengintegrasikan tindakan kearah sasaran organisasi atau perusahaan. (6) Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan”.⁹ (7) Dalam proses penyidikan, koordinasi bertujuan untuk terbinanya suatu sistem saling mengawasi (*System Ceking*) antara sesama, misalnya antara penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

⁸ Irene Diana Sari Wijayanti, 2008, *Manajemen*, Yogyakarta: Mitra Cendekia, hlm. 13.

⁹ Malayu S.P Hasibuan, 2014, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Im. 88.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keberadaan asas koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui prinsip koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia landasan utamanya ialah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang bunyinya adalah: *“Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia”*.

Asas koordinasi terkandung dari beberapa prinsip, yaitu: (1) pengawasan (2) petunjuk, (3) bantuan penyidikan, (4) bantuan teknis, (5) bantuan taktis, (6) bantuan upaya paksa. Selanjutnya dapat diketahui bahwa dalam prinsip koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia terkandung unsur-unsur (a) Pengawasan, Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyidik oleh penyidik pegawai negeri sipil memiliki tujuan lain yakni agar penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (2) Pembinaan kemampuan, Sebagaimana dikatakan bahwa kemampuan teknik dan taktik penyidikan penyidik pegawai negeri sipil berada dibawah pembinaan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam ruang lingkup yang luas, yakni dalam sistem peradilan pidana, komponen penyidikan berada pada Kepolisian Republik Indonesia. (3) pemberian Petunjuk, Petunjuk yang diberikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyidik pegawai negeri sipil disebabkan karena masalah penyidikan merupakan masalah yang bersifat teknis dan merupakan keahlian tersendiri. (4) Pengendalian, Pada prinsipnya penyidik pegawai negeri sipil bertanggung jawab sampai tuntas atas tindakan penyidikan yang dilakukan atas dasar landasan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. (5) Evakuasi, Proses evaluasi dapat

dijadikan tolak ukur benar dan tidaknya setiap tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam proses penyidikan. (6) Rekomendasi, bukti dari sifat rekomendatif ini dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan melaksanakan segala kegiatan dalam rangkaian penyidikan misalnya mulai melaporkan penyidikan, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penyitaan, penyidik pegawai negeri sipil selalu melakukan atas rekomendasi dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

3.2 Fungsi Koordinasi antara Penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan dibawah koordinasi oleh penyidik Polri merupakan bagian dari sitem peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem-subsistem penegak hukum lain dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Meskipun PPNS mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisnya, bukan berarti Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaanya, maka dapat dikatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah bagian subsitem kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana. Hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Polri penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu. Hal itu karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik harus selau berkoordinasi dan di bawah pengawasan Polri.

Kegiatan koordinasi merupakan suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang yang menyangkut bidang penyidikan atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. Akan implementasinya seyogyanya memperhatikan hierarki masing-masing instansi.

Hakikat koordinasi, bertujuan untuk menyatukan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkut dan

menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkut pautkan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu unit kerja. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja, koordinasi harus dilakukan di semua tingkatan, baik di pusat maupun di daerah. Penyidik Polri sebagai Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS mempunyai kewajiban dan tanggungjawab memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional. Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya pelaksanaan tugas koordinasi, pengawasan dan bantuan teknis kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan, (1) Hubungan tata cara kerja agar terjalin kerjasama yang serasi. (2) Pembinaan teknis, dan (1) Bantuan operasional penyidikan.

3.3 Hubungan Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Hubungan kerja antara penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam KUHAP didasarkan pada sendi sendi hubungan fungsional. Dalam petunjuk pelaksanaan No. Pol : JUNGKLAK/37/VII/1991 tentang hubungan kerja antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksudkan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi didalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyidikan dibidang tindak pidana. Hubungan tata cara pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan dan bidang operasional. Di bidang pembinaan, hubungan kerja secara fungsional dalam rangka pelaksanaan koordinasi dilaksanakan langsung oleh satuan reserse. Hubungan kerja ini dilaksanakan secara horisontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal antara Polri dan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil. hubungan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri antara lain adalah (a) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, (b) permintaan bantuan penangkapan, (c) permintaan bantuan penahanan, (d) Berita acara penyerahan penyidikan, (e) permintaan izin penyitaan, (f) penyusunan berkas acara, (g) pelimpahan proses penyidikan, (h) penghentian penyidikan. Penulis mengungkapkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai hubungan kerja baik dan harmonis dengan Polri. Ketentuan KUHAP yang mengatur hubungan kerjasama antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Polri adalah (1) Koordinasi dan pengawasan PPNS berada pada Polri (Pasal 7 ayat 2), (2) Petunjuk dan bantuan Polri kepada PPNS (Pasal 107 ayat 1), (3) Penghentian penyidikan diberitahukan kepada Polri (Pasal 109 ayat 3), (4) Penyerahan berkas kepada penuntut umum melalui Polri (Pasal 110)

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Keberasaan Asas Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia di dalam peraturan perundang-undangan bersifat Koordinatif, pengawasan, pembinaan kemampuan serta pemberian petunjuk. Dapat dikemukakan bahwa meskipun tindak pidana yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan tindak pidana yang menyangkut ruang lingkup kedinasan dari departemen dari Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam proses akhir sepenuhnya tetap berpegang teguh pada pertimbangan yang diberikan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Kedua, Fungsi Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri bertujuan untuk menyatukan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkut dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menyangkut pautkan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu unit kerja. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja. Koordinasi dan Pengawasan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, Hubungan Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam KUHAP didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional, hubungan tata cara pelaksanaan koordinasi dan pengawasan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai hubungan kerja yang baik dan harmonis dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

4.2 Saran

Koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia hendaknya akan lebih baik jika berpegang teguh pada prinsip penegakan hukum yang bersendikan kepada kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan dalam melakukan tugasnya agar mencapai keberhasilan dan keharmonisan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi serta tidak melanggar dengan ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya, 2006 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2014, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdul Kadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhtarom, M, 1997, *Hukum Acara Pidana (Bagian I)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wirartha, I Made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi.

Wijayanti, Irene Diana Sari, 2008, *Manajemen*, Yogyakarta: Mitra Cendekia.